

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Tahanan politik Pulau Buru adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari jejak jejak sejarah Indonesia, Pahan Komunis, juga perang Ideologi pasca berakhirnya Perang Dunia ke dua, menjadikan kerang kepentingan ekonomi Internasional atau Neoliberalisme terbuka lebar yang tentu saja berdampak pada corak perpolitikan Nasional, salah satunya perjanjian New York Agreement dimana dominasi amerika terhadap kepentingan kapital di Indonesia kala itu menjadikan Papua tergadaikan.

Masa transisi Politik Nasional menjadikan 10.000 jiwa dituduh sebagai yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI, kemudian diasingkanlah ke Pulau Buru, sekalipun begitu para tapol sangat berkontribusi besar dalam pemanfaatan ruang semasa ditempat pengasingan, tercatat peristiwa pengasingan ke Pulau Buru dimulai pada Tahun 1969 hingga 1979. Evolusi dibidang pertanian merupakan bagian terbesar yang pernah terjadi pada masyarakat dengan status tahanan politik, hingga kini Pulau Buru merupakan daerah pemasok beras terbesar nomor dua berskala Nasional. Berikut kesimpulan dalam penelitian ini.

#### **6.1 Kontribusi Tahanan Politik dan Proses Perubahan Ruang**

Kontribusi terbesar dibidang pertanian merupakan aset terbaik yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh para tahanan politik masa itu mengingat penduduk asli Pulau Buru tidak mengenal

sistem irigasi dan persawahan, masyarakat adat setempat masih memanfaatkan hutan adat sebagai satu satunya sumber kehidupan. Evolusi pertanian hingga saat ini masih dikembangkan dalam program program penunjang yang dibuatkan oleh pemerintah antara lainnya, program transmigrasi.

Proses perubahan ruang yang dibuat oleh tahanan politik merupakan bagian yang tidak bisa terlepas oleh kondisi tahanan politik waktu itu, selain itu perubahan ruang dari hutan belukar ke sawah dan lokasi lokasi permukiman atau biasa yang disebut lokasi unit sejak awal kedatangan pada Tahun 1969 puncaknya terjadi pada Tahun 1972 yang dimana ada pengiriman keluarga tahanan politik. Ini merupakan perubahan yang sangat mencolok terutama pada unit Savana Jaya.

Sementara itu ada sudut pandang berbeda ketika meninjau dalam kacamara kemanusiaan, tahanan politik Pulau Buru, sekalipun sudah berstatus bebas namun masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat setempat seolah ada kecacatan sejarah yang hidup di tengah tengah masyarakat Pulau Buru, sekalipun begitu besar kontribusi yang diberikan terhadap daerah. Tercatat 10.00 jiwa yang ditinggal di Kecamatan Waeapo dan membuka lahan seluas 6.100 Ha lengkap dengan fasilitas penunjang dan areal pesawahan.

## **6.2 Jejak Perjalanan Tahanan Politik**

Tahanan politik memiliki latar belakang yang berbeda beda dengan status tahanan satu samalain, rata rata para tahanan politik berprofesi berbeda mulai dari tukang becak penjaga buku, seniman, politisi, dokter, hingga pengawal presiden pada masa itu. Tahanan politik pulau buru dikirim dari daerah masih masih sebagai tahanan

kota yang kemudian di kumpulkan menjadi satu di nusa kembangan dan di bawa ke pulau buru. Awal persinggahan pertama di Desa Jiku Kecil Kota Namlea kemudian menggunakan speed boot menuju lokasi pengasingan, kelompok pertama masuk melalui pantai Desa Sanleko dan yang kedua mengikuti Sungai Waeapo ke Desa Air Mendidih.

Terhitung tahanan politik yang berada di Desa Sanleko menghasilkan Unit 4 dan Unit 14 yang dimana merupakan Unit dengan konsep desa sekalipun diatur oleh masyarakat berstatus tahanan politik waktu itu. Sementara untuk rute Desa Air Mendidih menghasilkan Unit 1 dan Unit 2 juga membangun pusat pelayanan daerah pengasingan atau yang biasanya disebut Markas Komando. Setelah itu proses pembangunan Tahun 1972 menghasilkan Unit 15 dan Unit 16 yang berada tidak jauh dengan Unit 1 dan Markas Komando.

### **6.3 Rekomendasi**

Berdasarkan analisa dari data yang didapat dari penelitian yang berjudul **PROSES PEMBETUKAN RUANG OLEH TAHANAN POLITIK PADA MASA PEMBUANGAN DI PULAU BURU, MALUKU(PERIODESASI 1969-1979)** perubahan serta pola pembentukan ruang yang dilakukan oleh tahanan politik sangat layak untuk dikembangkan sebab merupakan potensi yang sayat mempengaruhi ekonomi masyarakat sekitar maka perlu adanya rekomendasi sebagai berikut:

#### **6.3.1 Pemerintah**

Status tahanan politik pulau buru perlu diapresiasi sebagai manusia merdeka yang ikut serta membangun daerah. Ini merupakan bagian yang tidak boleh dipisahkan, sebab minimnya apresiasi terhadap Eks Tapol menjadikan masyarakat setempat memandang mantan tahanan politik dengan stigma yang buruk, maka perlu adanya penetapan kawasan khusus jejak sejarah pengasingan juga pemberian penghargaan sebagai bentuk dari apresiasi selain itu memperhatikan rencana jangka panjang daerah kawasan waeapo yang merupakan daerah dengan potensi pertanian terbesar di pulau buru sehingga dapat memperbaiki ekonomi daerah setempat.

### **6.3.2 Penelitian Selanjutnya**

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan perlu melakukan penelitian lanjutan dengan skala yang lebih luas sehingga jejak peninggalan tahanan politik dapat di lihat secara detail, sebab keterbatasan ruang dan waktu yang mengakibatkan penelitian ini hanya di fokuskan pada Kecamatan Waeapo saja, sementara jejak para tahanan politik meliputi Kecamatan Waeapo, Kec.Lolongguba, Kec.Waitala, Kec.Teluk Kayeli dan Kec.Batabual. Juga diharapkan perlu pengembangan daerah pengasingan tahanan politik sampai pada konsep pengembangan dan penentuan lokasi bersejarah.